

STRATEGI MEMBANGUN SEKOLAH MUHAMMADIYAH YANG BERKEMANDIRIAN

Joko Susilo

Program Studi Pendidikan Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan
Jokoms_uad@yahoo.com

ABSTRAK

Sekolah Muhammadiyah merupakan wujud sekolah berpeciri yang membedakannya dengan sekolah-sekolah lain. Ciri tersebut apabila ditinjau dari segi manajemen, sekolah Muhammadiyah dikelola secara profesional, mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri, memiliki teknik evaluasi yang komprehensif, warga sekolah berdisiplin tinggi, memiliki budaya mutu berkemajuan serta dukungan kuat dari stakeholder. Dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah; berorientasi menciptakan generasi penerus yang bertakwa, unggul, berakhlakul karimah, mandiri, serta bermisi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Di samping itu juga menerapkan semangat nasionalisme dan patriotisme serta senantiasa mengikuti perkembangan zaman. Adanya penciri tersebut menggerakkan sekolah Muhammadiyah menuju sekolah yang berkemandirian dan berkeunggulan. Syarat pokok sebagai penggerak adalah komitmen dari seluruh civitas sekolah terhadap peran masing-masing. Dalam kajian berikut dipaparkan mengenai strategi membangun sekolah Muhammadiyah yang berkemandirian. Essensinya, sekolah Muhammadiyah yang berkemandirian dapat terbentuk dengan cara: 1) mengubah arah kebijakan berkemajuan, 2) membangun *leadership* yang tangguh, 3) menciptakan budaya yang berkejahteraan, dan 4) mempererat jejaring sekolah.

Kata Kunci: strategi, sekolah Muhammadiyah, berkemandirian

ABSTRACT

The Muhammadiyah school is the form of school that is different from other schools. In terms of management, Muhammadiyah schools are professionally managed, able to develop the curriculum independently, have comprehensive evaluation techniques, high disciplinary school residents, have a culture of continuous quality and strong support from stakeholders. In the implementation of education, Muhammadiyah schools implements Islamic values and kemuhammadiyah; oriented to create the next generation who are cautious, superior, berakhlakul karimah, independent, and mission da'wa amar ma'ruf nahi munkar. In addition, it also applies the spirit of nationalism and patriotism and always keep abreast of the times. The existence of such a founder drives the Muhammadiyah school to a school of self-reliance and excellence. The main requirement as the driving force is the commitment of all school civitas to their respective roles. In the following study, the strategy of building a Muhammadiyah school is established. Essentially, an independent Muhammadiyah school can be formed by: 1) changing the direction of progressive policies, 2) building strong leadership, 3) creating a prosperous culture, and 4) strengthening school networks.

Keywords: Strategy, Muhammadiyah School, Independence

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam pembaharu memiliki banyak amal usaha, baik dalam bidang keagamaan, kesehatan, sosiokultural, maupun pendidikan. Di dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah memiliki badan yang dikenal dengan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM), sebagaimana menurut Haedar Nashir (2013: 12), bahwa AUM saat ini sudah mencapai: 172 perguruan tinggi (universitas, sekolah tinggi, dan akademi), 1143 SMA/SMK/MA, 1772 SMP/MTs, 2604 SD/MI, 7623 TK ABA, 6723 PAUD, 71 SLB, dan 82 Pondok Pesantren.

Sekolah-sekolah Muhammadiyah yang tergabung di bawah naungan yayasan Muhammadiyah tersebut memiliki misi mulia, yaitu untuk menghasilkan *output* siswa yang berakhlakul karimah, cerdas, dan terampil dengan mengedepankan kualitas kemandirian dalam menghadapi tantangan global (M. Joko Susilo, 2017c:3). Oleh sebab itu, segala sesuatu yang menyangkut dengan siswa menjadi prioritas utama.

Karakteristik sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menjadi penciri sekolah yakni apabila ditinjau dari segi manajemen, sekolah Muhammadiyah dikelola secara profesional, mampu mengembangkan kurikulum secara mandiri, memiliki teknik evaluasi yang komprehensif, warga sekolah berdisiplin tinggi, memiliki budaya mutu berkemajuan serta dukungan kuat dari *stakeholders*. Dalam pelaksanaan pendidikan, sekolah-sekolah Muhammadiyah mengimplementasikan nilai-nilai keislaman dan kemuhammadiyah (AIK); berorientasi menciptakan generasi penerus yang bertakwa, unggul, berakhlakul karimah, mandiri, serta bermisi dakwah *amar ma'ruf nahi munkar*. Di samping itu, sekolah Muhammadiyah juga menerapkan semangat nasionalisme dan patriotisme melalui habit yang diterapkan di sekolah seperti menyanyikan lagu-lagu nasional ketika literasi, upacara bendera setiap hari senin dan hari-hari besar; serta senantiasa mengikuti perkembangan teknologi misalnya dengan memasukkan pelajaran TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) menjadi mata pelajaran wajib. Adapun ditinjau dari segi SDM, adanya sistem kaderisasi yang berkesinambungan dengan jelas serta komitmen kesungguhan dalam kerja secara cerdas, keras, tuntas, ikhlas, dan muntaz. Hal inilah yang bertindak sebagai penciri khusus tentang SDM di sekolah Muhammadiyah yaitu tentang ideologi dan loyalitas pada Muhammadiyah.

Adanya penciri tersebut menggerakkan sekolah Muhammadiyah menuju sekolah yang berkemandirian dan berkeunggulan. Artinya, sekolah Muhammadiyah memiliki kemandirian dan keunggulan tertentu dibandingkan sekolah-sekolah lain. Kemandirian sebagaimana yang diistilahkan oleh M. Joko S. (2017c:22) merupakan kondisi dimana tidak adanya ketergantungan sekolah untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi tujuannya. Artinya, sekolah memiliki kewenangan dalam mengelola administrasi dan pelaksanaan sekolah secara mandiri tanpa adanya intervensi dari pihak lain, mulai dari manajemen terhadap kurikulum, sarana dan prasarana, pembiayaan, pelaksanaan proses belajar mengajar, guru dan ketatausahaan, serta penilaian. Pada akhirnya, sekolah mampu berinovasi mengembangkan sekolahnya dengan model sekolah tertentu yang menjadi branding dan pilihan utama di kalangan masyarakat. Jelasnya, kemandirian sekolah merupakan hasil dari suatu usaha/proses yang kuat dari dalam sekolah yang bersangkutan melalui pengelolaan sekolah secara mandiri untuk mewujudkan sekolah dengan karakteristik yang 'lebih' dari standar minimal yang ditetapkan pemerintah. Suatu sekolah dikatakan mandiri apabila telah memenuhi standar nasional pendidikan dan memiliki keunggulan tertentu, sehingga istilah kemandirian akan melekat pada sekolah tersebut.

Wacana pengembangan kemandirian sekolah Muhammadiyah ini sudah mengemuka sejak masa kepemimpinan Amien Rais pada periode Muktamar 1995-2000 yang bergulir hingga saat ini (Majelis Dikdasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2015). Perkembangan yang lebih signifikan terlihat dari berbagai model-model sekolah seperti model sekolah unggul, sekolah mandiri, sekolah karakter, sekolah lingkungan, sekolah atlet, dan lain-lain yang bermunculan di amal usaha Muhammadiyah (M. Joko S., 2017c:148).

Sebetulnya tidaklah sulit untuk mewujudkan kemandirian sekolah. Komitmen dari seluruh civitas sekolah terhadap peran masing-masing menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi. Dalam kajian berikut dipaparkan mengenai strategi membangun sekolah Muhammadiyah yang berkemandirian.

Beberapa kajian penelitian relevan terkait strategi dalam pengembangan sekolah dapat dijabarkan sebagai berikut. Menurut M. Joko S. (2017c), penciri kemandirian sekolah Muhammadiyah dapat diramu menjadi 4 hal pokok, yaitu: (a) kepemimpinan kepala sekolah dengan 3 kemampuan utama yaitu *strategic leadership*, *transformational leadership*, serta *learning centered leadership*; (b) budaya sekolah yang berkesejahteraan; (c) daya dukung sekolah mulai dari kualifikasi SDM, fasilitas, kesiapan sekolah, kinerja sekolah, serta dukungan dari eksternal seperti majelis, komite sekolah, stakeholder, maupun orang tua siswa; dan (d) pelaksanaan pendidikan di sekolah yang mencakup kemampuan sekolah dalam mengembangkan kurikulum, pendanaan sekolah yang transparan dan akuntabel, sarana/fasilitas sekolah yang memadai, serta kesiapan SDM sebagai pelaksana pendidikan di sekolah.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Baharuddin (2009), temuan penelitian yang dihasilkan, yaitu 3 hal sebagai berikut.

- a. Dipandang dari segi kepemimpinan, meliputi: a) melakukan periodisasi kepengurusan, b) proses pemilihan dan pengangkatan kepengurusan mengikuti AD/ART, c) membuat aturan tata kerja dan kepatuhan bagi lembaga/sekolah, d) menyelaraskan visi-misi dan tujuan yayasan/lembaga, e) melakukan transformasi kepengurusan dan kepemimpinan lembaga dari figuritas menuju kolektif-ter sistem, f) melakukan pembinaan secara kontinyu terhadap sekolah/madrasah binaan, g) menumbuhkan sistem otonomi kepada pihak sekolah/madrasah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing lembaga, h) meminimalisir sikap status quo dari para pengurus dan pengelola pendidikan, i) membudayakan setiap ide atau gagasan diwujudkan dalam bentuk tulisan, dan j) membentuk dan menetapkan konsultan pendidikan dan tenaga teknis untuk pengawasan manajemen sekolah.
- b. Dari segi pengembangan SDM, melakukan: a) memberikan bantuan beasiswa bagi guru-guru untuk studi lanjut, b) menyatukan visi-misi, dan gerak seluruh komponen dalam pengembangan kualitas pendidikan, c) melakukan pemerataan dan keadilan dari sisi kesejahteraan terhadap seluruh SDM yang terlibat secara proporsional, d) melakukan transformasi budaya kerja dari seluruh tradisional dan amatiran menuju budaya profesional, e) melakukan perubahan secara terus menerus untuk menghindari agar pengelolaan pendidikan tidak terjebak dalam kondisi stagnan, f) memberikan fasilitas bagi pengembangan profesi guru melalui pelatihan profesi, seminar, workshop, maupun pelatihan-pelatihan, g) melakukan penataan efektivitas jam mengajar guru, h) pengembangan sekolah dan madrasah diharapkan dalam jangka pendek mencapai Standar Nasional dan jangka menengah memiliki sekolah bertaraf internasional, i) menyusun tata tertib sekolah guna menciptakan ketertiban dan kelancaran proses

- pendidikan dan pengembangan potensi siswa, j) membangun lingkungan sekolah yang asri dan indah, mebahkan jam-jam di luar jam paket (*try out*), dan k) pengaktifan kegiatan MGMP maupun KKS/KKM (kelompok kerja sekolah/madrasah).
- c. Dari segi dukungan masyarakat, yaitu: a) meningkatkan hubungan dan kerjasama dengan masyarakat maupun instansi dna lembaga-lembaga terkait, b) meminimalkan munculnya persaingan yang tidak sehat antarlembaga di dalam satu yayasan maupun antarlembaga pendidikan di sekitarnya, c) meningkatkan fanatisme, kepuasan pelayanan, kepercayaan, serta hubungan yang semakin erat antara lembaga dan para alumni, d) mengembangkan SMK Berbasis Pesantren (*Boarding school*) yang mampu melahirkan lulusan siap kerja dengan basis kepribadian santri, e) mengembangkan sekolah/madrasah yang memiliki keunggulan-keunggulan berbasis lokal, f) memaksimalkan peran wali murid, g) membangun posisi lembaga pendidikan yang strategis, nyaman, dan kondusif.

Menurut Nur'aeni, dkk (2013), menunjukkan bahwa strategi mewujudkan sekolah unggulan meliputi hal berikut.

- a. Strategi pengelolaan SDM dilakukan dengan cara: (1) melakukan pengembangan kemampuan sumber daya manusia, modernisasi manajemen kelembagaan; (2) melakukan konsolidasi untuk menemukan praktik yang baik dan pelajaran yang dapat dipetik dengan baik melalui diskusi; dan (3) fokus secara totalitas maupun diskusi secara luas melalui lokakarya atau seminar dalam peningkatan mutu pembelajaran.
- b. Strategi dalam pengembangan sekolah unggulan yang tepat, meraih prestasi lokal maupun nasional, mulai dari guru, peserta didik, kerjasama dengan sekolah yang lebih maju, pengelolaan administrasi dan nilai yang memenuhi standar sekolah maju, mempunyai keunggulan di bidang tertentu untuk eksis di tingkat nasional.
- c. Strategi dalam pengelolaan dana yang tepat, baik dari bantuan pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, komite sekolah/orang tua peserta didik, serta sumber dana dari *stakeholder*. Adapaun penggunaan dananya juga diatur secara transparan dan akuntabel, mulai dari pendanaan dari pusat, MoU maupun dari yang lain.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan hasil dari sebuah kajian deskriptif dari studi literatur yang disarikan dari beberapa hasil-hasil penelitian pada beberapa lembaga pendidikan yang sedang tumbuh dan berkembang. Penekanan metode penulisan pada pengembangan pemikiran dalam menyusun strategi membangun kemandirian sekolah dengan mensitasi beberapa referensi yang mendukung ide/gagasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan sekolah yang berkemandirian merupakan wujud meningkatkan mutu pendidikan, dimana sekolah berwenang untuk mengatur seluruh kegiatan yang bertujuan untuk mencapai cita-cita sekolah. Dalam kegiatan pengembangan ini dibutuhkan strategi yang mampu melejitkan sekolah melalui manajemen mutu yang maksimal, memiliki keunggulan-keunggulan tertentu, berdaya saing tinggi, serta terus menerus memperbaiki kualitas pendidikan.

Mohammad Ali & Marpuji Ali (2005: 158-160); M. Joko S. (2017b: 125), bahwa secara normatif *output* dari sekolah Muhammadiyah memiliki tolok ukur: 1) tertib ibadah (al-Islam), 2) mahir baca tulis al-Quran, 3) berwawasan kebangsaan, 4) pengetahuan akademis tinggi, 5) ketrampilan berbahasa asing dan 6) ketrampilan komputer.

Sekolah Muhammadiyah memiliki strategi tersendiri dalam menyelenggarakan sekolah-sekolahnya. Hal ini terlihat dari fakta-fakta dimana sekolah Muhammadiyah tetap menjadi pilihan favorit masyarakat meskipun keberadaannya dikelilingi oleh sekolah-sekolah lain yang berdiri (Zainal Arifin, 2013). Strategi-strategi tersebut antara lain meliputi: berupaya memperoleh dukungan yang tinggi dari orang tua dan masyarakat; memiliki kebijakan pimpinan sekolah yang kuat, kurikulum yang jelas sasaran dan tahap pencapaiannya, pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas, siswa yang memiliki harapan tinggi, serta iklim sekolah yang kondusif (M. Joko S., 2016: 568).

Menurut Zainal Arifin (2013), dalam penelitiannya tentang strategi pengembangan sekolah Muhammadiyah di masyarakat NU Konservatif menunjukkan hasil bahwa strategi pengembangan TK ABA dan SD Muhammadiyah di Mlangi meliputi: pencitraan, peningkatan program ekstrakurikuler, peningkatan sarana dan prasarana, mengakomodasi budaya lokal, dan memberikan toleransi serta akomodasi perbedaan kultur siswa.

Berdasarkan hasil kajian berbagai literatur dapat diramu bahwa strategi membangun sekolah Muhammadiyah yang berkemandirian dengan cara sebagai berikut.

a. Mengubah arah kebijakan berkemajuan

Adanya perubahan paradigma dalam menentukan arah kebijakan dari sentralisasi menjadi desentralisasi menjadikan pihak sekolah sebagai penentu dalam pengambilan kebijakan. Kebijakan strategis dalam penyelenggaraan sekolah adalah kurikulum. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 36 Ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum di semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Adanya kebijakan tersebut maka setiap sekolah berkewajiban mengembangkan kurikulum sesuai dengan karakteristik yang dimiliki sekolahnya, misalnya memanfaatkan potensi lingkungan sekitar sekolah dalam proses pembelajaran, mengimplementasikan visi-misi yang telah ditetapkan sekolah dalam setiap aktivitas, mengintegrasikan visi sekolah ke dalam setiap mata pelajaran, dan lain-lain sehingga terwujud sekolah yang sesuai dengan tujuannya.

Dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menjadi penciri dalam menentukan arah kebijakan antara lain: 1) mengunggulkan penciri sekolah, misalnya keunggulan dalam keterampilan membaca Al-Qur'an, berdakwah, dan lain-lain; 2) mengunggulkan potensi lokal sekolah, misalnya keterampilan membatik, berbahasa Jawa, karawitan, hadrah, dan lain-lain; 3) Keunggulan dalam keahlian tertentu, misalnya robotik, atlet, taek wondo, dan lain-lain; serta 4) mengunggulkan inovasi sekolah dengan membentuk *branding school* yang bermuara pada kemandirian. Inovasi-inovasi pengembangan sekolah yang muncul seperti *fullday school*, sekolah alam, *green school*, sekolah sehat, sekolah bersih, sekolah atlet, sekolah adiwiyata, dan lain-lain.

Kebijakan strategis yang pada aspek kurikulum, sekolah Muhammadiyah mengimplementasikan kurikulum nasional dalam batas minimal wajib yang mencerminkan ideologi Muhammadiyah, bertitik tolak dari konsep tauhid (islam), serta memuat nilai-nilai islam (terintegrasi dalam mata pelajaran). Materi yang diberikan mampu menjawab tantangan

global dan perkembangan ipteks, bersifat kontekstual, mencerminkan tertib ibadah (al-islam), dan ada muatan berwawasan kebangsaan sebagai bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Metode pembelajaran menerapkan sistem kredit semester (SKS), ada model kelas reguler, cerdas istimewa, bakat istimewa, dan kelas unggulan lain yang variatif, ada pelibatan siswa dalam kegiatan dakwah dan organisasi Muhammadiyah. Untuk evaluasi di sekolah Muhammadiyah ada evaluasi kinerja guru dan ada evaluasi hasil belajar siswa (M. Joko Susilo, 2016b).

b. Membangun *leadership* yang tangguh

Kontribusi *leadership* untuk mengembangkan sekolah jauh paling besar dibandingkan komponen sekolah lainnya. Peran sepala sekolah sangatlah pokok, sebagaimana menurut M. Joko S (2017a), dalam buku petunjuk evaluasi yang dikembangkan dari hasil penelitian disertasinya, diterangkan bahwa layaknya caudal (ekor) ikan, maka *leadership* berperan pokok sebagai penggerak maju mundurnya pergerakan suatu sekolah.

Di dalam sekolah-sekolah Muhammadiyah, kepemimpinan kepala sekolah bercirikan semangat dakwah '*amar makruf nahi munkar*. Menurut Ishak (2011), ciri kepemimpinan tersebut adalah: 1) berasaskan rasa *ubudiyyah* yang tinggi terhadap Pencipta; 2) mendidik manusia menjadi manusia yang baik. Pemimpin dalam hal ini sebagai suri tauladan yang baik bagi yang dipimpin; 3) menghindari kemungkaran (kejahatan); dan 4) menghasilkan *natijah* (*output*) yang baik untuk semua pihak, baik di dunia maupun di akhirat.

Selain itu, corak kepemimpinan di persyarikatan Muhammadiyah berupa kolektif kolegial yang menggabungkan kekuatan *leader* dan *manager* dalam satu sekolah. Hal ini berarti bahwa sekolah bukan milik perorangan atau pimpinan sekolah namun milik bersama, sehingga dalam pengelolaan sekolah selalu dipimpin dengan azas demokrasi atas dasar musyawarah mufakat dengan tujuan untuk mencapai kemaslakanatn warga sekolah. Pemilihan kepala sekolah harus memiliki persyaratan tambahan selain dari kompetensi manajerial, kepribadian, profesional, sosial, pedagogik, juga penguasaan Al-Islam dan Kemuhammadiyan (AIK) serta implementasinya di masyarakat dalam bentuk keterlibatan secara langsung baik di tingkat ranting, cabang, daerah, wilayah, maupun pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai bentuk realisasi nilai-nilai dakwah (M. Joko Susilo, 2016b).

c. Menciptakan budaya yang berkesejahteraan

Budaya sekolah merupakan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh warga sekolah, diperoleh dari sekolah maupun lingkungan, dan direfleksikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi penciri suatu sekolah (M. Joko S, 2016). Menurut Hargreaves (1994: 16); Harris (2003: 14), budaya sekolah yang ideal tergolong menjadi 4 tipe: 1) *the formal school culture*, yang menekankan pada tujuan belajar, tetapi hubungan sosial antara staf dan siswa lemah; 2) *a welfarist culture*, memiliki hubungan staf dan siswa yang akrab dan bersahabat, tetapi ada tekanan akademik; 3) *a hothouse culture*, menekan staf dan siswa untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan di sekolah, akademik, maupun sosial; dan 4) *a survivalist culture*, ditandai dengan hubungan sosial yang buruk dan prestasi akademik yang rendah.

Menurut Zamroni (2007: 55), budaya sekolah yang berkesejahteraan merupakan kondisi dimana hubungan antarwarga sekolah berjalan akrab, hangat, dan manusiawi, serta motivasi untuk berprestasi tinggi. Menurut M. Joko Susilo (2016b), di sekolah-sekolah Muhammadiyah, menerapkan budaya mutu yang terpadu melalui manajemen berbasis persyarikatan (MBP) atau manajemen berbasis sekolah (MBS). Selain itu, warga sekolah juga

memiliki kedisiplinan tinggi; kesungguhan dalam kerja secara cerdas, keras, tuntas, ikhlas, dan muntaz; serta adanya koordinasi rutin kepala sekolah dengan civitas sekolah, orang tua dan masyarakat. Transparansi kegiatan sekolah inilah yang membuat orang tua merasa tenang dan memasrahkan pendidikan putra putri mereka kepada sekolah. Hasilnya, berdampak pada animo masyarakat yang tinggi terhadap sekolah tersebut.

d. Mempererat jejaring sekolah

Pada dasarnya, jejaring sekolah dilakukan dalam rangka sekolah memperoleh dukungan dari masyarakat, baik berupa moril maupun material. Dukungan sekolah ini sifatnya sangat penting, karena masyarakat berperan sebagai pelaku pendidikan sekaligus pengguna pendidikan. Dukungan dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, komite sekolah/orang tua siswa, stakeholder, perguruan tinggi, asosiasi profesi serta lembaga lain yang terkait ((Ditjen Pembinaan SMA, 2008: 22).

Di sekolah-sekolah Muhammadiyah, sumber utama dukungan pendanaan berasal dari siswa walaupun juga ada yang berasal dari pemerintah/yayasan. Tidak hanya itu, sekolah-sekolah kebanyakan memiliki BUMS (Badan Usaha Milik Sekolah) yang hasilnya sekolah lebih stabil dalam masalah pendanaan. Pengelolaan pendanaan juga transparan dan akuntabel, menggunakan sistem pengelolaan keuangan dengan 4 prinsip sejahtera: sekolah, guru, karyawan, wali murid. Selain itu, dukungan internal civitas akademika yang kuat, kemampuan penggunaan IT yang baik, adanya dukungan eksternal yang kuat (komite, masyarakat, orang tua \geq 60% mendukung pembelajaran dengan SKS, dukungan dari majelis/dinas, tenaga konsultan, PT), untuk sarana prasarana sekolah Muhammadiyah banyak yang berdiri di tanah wakaf yang sudah diserahkan kepada persyarikatan, kelengkapan sarana prasana lebih dominan diupayakan secara mandiri, sehingga bisa memiliki sarana prasarana penunjang dan pendukung pendidikan yang jauh lebih memadai jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain. Tentunya dengan kriteria dan persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan proses pendidikan termasuk berbasis pada religi, lingkungan, teknologi, dan perkembangan zaman (M. Joko Susilo, 2016b).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa essensialnya, sekolah Muhammadiyah yang berkemandirian dapat terbentuk dengan cara: 1) mengubah arah kebijakan berkemajuan, 2) membangun leadership yang tangguh, 3) menciptakan budaya yang berkesejahteraan, dan 4) mempererat jejaring sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Zaenal. 2013. "Strategi pengembangan sekolah Muhammadiyah di masyarakat NU Konservatif". *Jurnal Analisa*, 20(2), 233-244.
- Baharuddin. 2009. *Strategi pengembangan lembaga pendidikan Ma'arif NU (Studi Multisitus: Yayasan Al-Ma'arif Singosari, LP Ma'arif Pakis, dan Yayasan An-Nur Bulalawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur)*. Disertasi dan Tesis Program UM. Diakses dari: <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/disertasi/article/view/1015>. Pada tanggal 27 Juli 2017.

-
- Ditjen Pembinaan SMA. 2008. *Konsep sekolah kategori mandiri/sekolah kategori nasional (SKM/SSN)*. Jakarta: Depdiknas.
- Haedar Nashir. 2013. *Muhammadiyah abad kedua*. Yogyakarta: Suara Muhamadiyah.
- Hargreaves, A. 1994. *Changing teacher: Changing times*. London: Cassel.
- Harris, A. 2003. *School improvement: What's in it for Schools?*. London and Ner York: RoutiedgeFalmer.
- Ishak, S. 2011. "Model kepemimpinan etika berlandas sirah Nabi Muhammad saw". *Jurnal Hadhari*, 3(2), 23-44.
- Mohamad Ali dan Marpuji Ali. 2005. *Mazhab al-maun: Tafsir ulang praksis pendidikan Muhammadiyah*. Yogyakarta: Apeiron philotes.
- M. Joko Susilo. 2016. "Strategi menciptakan budaya sekolah yang kondusif melalui paradigma sekolah-sekolah unggul muhammadiyah". *Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education)*, Prodi Pendidikan Biologi FKIP UAD. Hlm, 567-575.
- _____. 2017a. *Buku panduan evaluasi kemandirian sekolah*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- _____. 2017b. "Leadership Model in Muhammadiyah to create independence school". *Proceeding of International Symposium on the Transition from School to Work*. Yogyakarta State University, Hlm,125-131.
- _____. 2017c. *Pengembangan Model Evaluasi Kemandirian Sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Sleman*. Penelitian Disertasi tidak dipublikasikan. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Majelis Dikdasmen PWM DIY. 2015. *Kumpulan Peraturan/Ketentuan: di Lingkungan Pendidikan Dasar dan Menengah PWM di Yogyakarta*. Yogyakarta: Majelis Dikdasmen PWM DIY.
- Nur'aeni, Utama, dan Djalal Fuadi. 2013. *Strategi mengembangkan sekolah unggulan di SMA Batik 1 Surakarta*. Sukakarta: UMS.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.
- Zamroni. 2007. *Meningkatkan mutu sekolah: Teori, strategi, dan prosedur*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.